

## Refleksi Partisipasi Jawara dan Ulama Banten pada Arena Politik: *Kajian Studi Dukungan Masyarakat Banten Terhadap Ma'ruf Amin Sebagai Calon Wakil Presiden*

Akbarudin<sup>1</sup>, Mohamad Ikrom Arasid<sup>2</sup>, Ita Rosita Wahyiah<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM) PC NU Kota Serang

<sup>2,3</sup> Universitas Bina Bangsa

### Info Artikel

#### Riwayat Artikel:

Diterima 02, 10, 2023  
Disetujui 25, 10, 2023  
Diterbitkan 02, 11, 2023

#### Katakunci:

Ace  
Cleric  
Politics

### ABSTRACT

From various literatures and their history, in general the ulama of Banten have two groups of Student, the Student are classified according to their potential. The first santri had the potential in the field of religion so that later they could become scholars like the teacher, secondly the santri who had the potential of martial arts so-called jawara, Jawara in Banten was present as a guardian of the ulama and defended the truth. The term social bandit is the Dutch colonial claim on the participation of champions who have resisted it. The spectrum of ulama on political dynamics is not new, but even in the era of the sultanate there have been political activities. Even from the time of the sultanate, Cleric became an important pillar in the life of the state and society. It was in this condition that the sultan as a statesman also played his role as panotogomo (religious life organizer), a concept that united the spirit of ulama and umaro in a sultanate government power organization. Cleric and ace a in Banten have become a symbol of "kokolot" which is revered in leading the community both in religious rituals and other social events. True political activity is the right choice or way to try to increase productivity, resilience, security, education, health and the quality of life of the nation and state. The people of Banten are the most obedient and obedient towards the ulama. The choice of Cleric from Banten, which is a shaykh of Muhammad Nawawi al-Bantani, namely kh. Ma'ruf amin as a vice presidential candidate from many champions, Cleric, Students, youth and the general public said they were in droves and enthusiastic and even declared practical and self-supporting organizations to support the upcoming political contestation. Banten people feel valued by the appearance of kh. Ma'ruf amin the original banten.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



### Penulis Korespondensi:

**Ita Rosita Wahyiah**

Universitas Bina Bangsa

Email: [ita.rosita.wahyiah@binabangsa.ac.id](mailto:ita.rosita.wahyiah@binabangsa.ac.id)

### Cara Sitasi Artikel ini dalam APA:

Akbarudin, Arasid, M. I., & Wahyiah, I. R. (2023). Refleksi Partisipasi Jawara dan Ulama Banten pada Arena Politik: Kajian Studi Dukungan Masyarakat Banten Terhadap Ma'ruf Amin Sebagai Calon Wakil Presiden. *LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren*, 1(2), 304~311. <https://doi.org/10.35870/ljit.v1i2.2924>

## 1. PENDAHULUAN

Provinsi Banten memiliki luas wilayah kurang lebih sebesar 8.651,20 km<sup>2</sup> yang tertera pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Pada tahun 2019, terdapat pembaharuan luas wilayah administrasi atas dasar Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Provinsi Banten memiliki luas 9.662,92 km<sup>2</sup>. Provinsi Banten tertera memiliki 2 (dua) Kota yakni Tangerang dan Cilegon serta 4 (empat) Kabupaten, yakni Tangerang, Serang, Pandeglang dan Lebak. Pun demikian Provinsi Banten mengalami pemekaran wilayah sehingga terbentuklah dua Kota baru yaitu Kota Serang dari Kabupaten Serang (UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten) dan Kota Tangerang Selatan dari Kabupaten Tangerang (UU Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten) (Banten, 2024).

Kebudayaan Banten sangat erat dengan nilai budaya Islam, sehingga tercipta suatu budaya unik yang disebut asimilasi budaya dan difusi budaya antara budaya Islam dan budaya lokal. Sebaliknya menurut Ankerman, perpaduan antara kebudayaan (Islam) dan kebudayaan daerah dapat disebut sebagai kompleks kebudayaan (kumpulan budaya), dan lingkungan di mana unsur-unsur kebudayaan itu berada dapat disebut sebagai lingkungan kebudayaan (culture of the culture) (Irfani, 2011).

Berbicara tentang Banten tidak terlepas dari peran serta para tokoh dan ulama. Seperti halnya perkembangan Kronik Banten dan sastranya, lahirnya para jagoan yang masih kita kenal hingga saat ini pun melalui proses sejarah yang panjang. Ketika pemerintah kolonial memberikan tekanan yang semakin besar terhadap masyarakat adat pada abad ke-19, masyarakat adat melakukan perlawanan. Sejak zaman sultan, ulama dan tokoh memegang peranan penting, termasuk dalam peperangan. Para ulama biasanya mempunyai dua kelompok santri yang berkembang sesuai dengan kemampuannya. Kelompok pertama terdiri dari santri yang mempunyai keterampilan dan bakat di bidang ilmu agama dan kelak dapat menjadi ulama sekaligus guru. Kelompok kedua terdiri dari santri dengan bakat yang berhubungan dengan pencak silat. Selanjutnya para jawara ini dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, masyarakat Jawara yang menganut ilmu agamanya disebut "Jawara Ulama", dan kedua, mereka adalah golongan yang menggunakan "ilmu tersembunyi" (ilmu hitam). Penggunaan istilah "Elmu Tersembunyi" bagi Masyarakat Banten merujuk pada pengetahuan (keterampilan) untuk mencapai kekebalan (kadugalan) yang tidak berdasarkan ajaran Islam. Ilmu ini biasa juga disebut dengan "elmu rawayan" (Lubis, 2003).

Sejarah Banten tidak terlepas dari kepemimpinan para Kiyai atau Ulama, dan Jawara. Sejarah pemberontakan penting di Banten, seperti Pemberontakan Geger Cilegon tahun 1888 (Cartodillo, 1984) dan Pemberontakan Komunis tahun 1926 (Williams, 2003), posisi ulama yang dibantu oleh jawara menjadi penggerak sentral. Bahkan revolusi tahun 1945 mampu mengantarkan masyarakat secara spontan memosisikan ulama sebagai pemimpin formal baik di ranah sipil maupun militer. Jabatan warga, bupati, camat, wedana, dan kepala desa dijabat oleh ulama. Bahkan pemimpin militer di Banten adalah ulama Sjam'un, ia kemudian menyandang gelar brigadir jenderal (Suharto, 2001) (Hamid, 2010).

Dapat juga dikatakan bahwa penduduk Banten sangat menderita pada abad ke-19, terutama setelah dibubarkannya Kesultanan Banten oleh deandells pada tahun 1812. Struktur kekuasaan Banten menjadi sangat tidak stabil karena kehilangan tulang punggungnya. Meski mempunyai status tinggi dan dihormati di masyarakat, namun kaum bangsawan tidak lagi mempunyai kekuasaan. Di sisi lain, sebagian pemerintahan kolonial, khususnya elite birokrasi, belum mengakar sehingga suasana pengaruh lebih terkonsentrasi di kalangan Ulama atau Kyai dan Haji. Selain itu Jawara juga berfungsi sebagai kepala desa (Michrob & Chudari, 1993).

Beberapa literatur terdahulu yang bersinggungan yakni diantaranya Dinamika Peran Sosial Politik Ulama dan Jawara di Pandeglang Banten yang mendeskripsikan relasi patron-klien (Muslim et al., 2015). Ulama dan Politik: Keterlibatan Ulama Sumatera Selatan dalam Politik Praktis dan Community Empowerment Pada Abad XX yang mendeskripsikan beberapa Kiai atau Ulama yang terlibat dalam politik praktis dan *community empowerment* berimplikasi terhadap kemajuan (Nasution, 2017). Ulama Sebagai Penyeimbang Kekuatan Sosial Politik Di Indonesia menyimpulkan bahwa dan tokoh agama dibutuhkan untuk menjadi kekuatan positif antara nilai yang diperjuangkan dengan kenyataan yang jauh dari norma-norma kepatutan. Ketika berharap ke depan para tokoh agama dan ulama mendapat jatah kursi di dewan legislatif untuk menjadi suara penyeimbang dan menjadi penyambung lidah masyarakat (Putra, 2016). Ulama Sebagai Penyeimbang Kekuatan Sosial Politik Di Indonesia juga dapat diformulasikan dengan artikel Respons Aliansi Ulama Madura (AUMA) terhadap Dinamika Politik Keagamaan di Pamekasan Madura bahwa dalam merespons isu politik-keagamaan menggunakan pola persuasive, preventif dan represif (Topan, 2022).

*Refleksi Partisipasi Jawara dan Ulama Banten pada Arena Politik:  
Kajian Studi Dukungan Masyarakat Banten Terhadap Ma'ruf Amin Sebagai Calon Wakil Presiden  
(Akbaruddin et. al.)*

Dalam artikel Eksistensi Ulama Dalam Politik Islam menyatakan bahwa Pada masa-masa awal Islam bahwa fungsi politik dan fungsi agama adalah sesuatu yang menyatu. Antara kedua fungsi tersebut tidak mengalami dikotomi yang memisahkan antara satu dengan yang lainnya (Ridho et al., 2021). Sejalan dengan artikel Kiai Dan Politik; Relasi Ulama Dan Umara Dalam Mewujudkan Perdamaian Umat Beragama Dan Bernegara bahwa Keterlibatan kiai atau ulama di medan politik praktis merupakan bukti sejarah yang riil, seperti ikut bergerilya melawan penjajahan yang sebagian besar komandannya adalah para kiai. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor urgen, yaitu; pertama, *alasan teologis*; politik dinilai sebagai bagian integral dari ilmu keagamaan, dan karena itu tidak perlu dijaui. Kedua, *Alasan dakwah*; berdakwah melalui jalur politik merupakan metode strategis dalam menyebarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam sebagaimana yang dicontohkan Nabi dan *al-Khulafā al-Rāsyidīn*, sebab lewat jalur politik medan dakwah semakin luas, mudah, dan efektif. Tujuannya tak lain adalah berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam, menegakkan keadilan, dan mencontohkan *amar ma'ruf nahi munkar* (Ridho et al., 2021).

Temuan dalam artikel Relasi Kuasa Ulama Sufi dan Negara dalam Kultur-Budaya Politik Indonesia menyatakan bahwa peran penting dimensi sufisme yang direpresentasikan melalui para ulama sufi dalam ruang publik (politik kekuasaan) negara, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam historisitas Indonesia, relasi ulama sufi dan negara telah berlangsung berabad-abad hingga era modern sekalipun, yakni sejak era kerajaan Islam hingga pemerintah Indonesia modern ini. Relasi keduanya, dalam teori politik terjadi baik secara “descending of power” maupun “ascending of power”. Descending of power identic dengan religio political power, yakni kekuasaan berdasar agama dengan menempatkan ulama sufi sebagai representasi rakyat dan di atas kekuasaan raja. Sementara itu, ascending of power dimaknai sebagai sistem politik yang memisahkan antara agama dan negara. Hubungan yang problematic ini menempatkan para ulama sufi tetap secara transenden menjadi bagian dari negara baik secara langsung maupun jarak jauh (Rubaidi, 2021). Sejalan dengan artikel Ulama dan Jawara dalam Dinamika Politik Banten bahwa walaupun tidak terlibat secara langsung dalam politik lokal, posisi ulama masih cukup strategis terutama dalam menggerakkan masyarakat. (Ilham, 2019)

Kemudian Interaksi Politik Jawara dalam Pembangunan Perspektif Tindakan Komunikatif yang membahas kontruksi komunikasi politik jawara (Fitriyah et al., 2019). Kemudian, Jawara Dalam Perubahan Sosial Di Masyarakat Banten yang mendeskripsikan terdapat pergeseran orientasi kepentingan politik dan kepemimpinannya dikategorikan otoritas tradisional (Athoullah, 2020). Dinamika Patronase Politik Jawara Di Banten juga mendeskripsikan bahwa Kekuasaan dalam kepemimpinan jawara pada saat ini sudah tidak relevan, karena jawara tidak mampu berperan sebagai pengontrol sosial. Perkembangan zaman menandakan kemajuan masyarakat Banten untuk berfikir rasional dan realistis. Sehingga kearifan jawara luntur tergeser oleh derasnya perubahan sosial (AFRIATNA, 2016)

Dalam terminologi yang berkembang, Jawara dipahami sebagai bandit atau preman sosial, bahkan ada yang mengklaim bahwa mereka, dengan konotasi negatif, seperti pemberontak. Demikian pula dengan kajian Roland Barthes mengenai implikasi semiotika (Kevinia et al., 2024). Pun pada paradigma yang berkembang tidak sedikit masyarakat memahami bahwa struktur sosial antara ulama dan politik merupakan dua kubu yang saling bersebrangan serta mendeskripsikan peran ulama dan jawara pada konstelasi politik. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan kajian teoritik tentang partisipasi jawara dan ulama banten pada konteks kontestasi politik melalui dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin daerah kota serang provinsi banten.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam teks ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif (Creswell, 2016). Pendekatan yang digunakan adalah studi Pustaka. Begitu pula dengan pemahaman bahwa penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk “eksplorasi”. Penelitian kepustakaan juga dapat digunakan untuk fokus pada metode penelitian deskriptif kualitatif (Darmalaksana, 2020). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi pencarian literatur yang relevan dari berbagai sumber referensi yang komprehensif. Data dikumpulkan dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai sumber literatur seperti artikel, jurnal, dan buku penelitian terdahulu (Raco, R, 2010).

Kemudian mengklasifikasikan dan memilih data tersebut guna melakukan analisis data dan menemukan data yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Strategi analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap. Jadi, tahap pertama adalah tahap di mana Anda mengumpulkan dan meninjau semua data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah data diambil, data tersebut dibandingkan dan divalidasi terhadap data dari berbagai hasil dan sumber yang akurat. Kedua, dilakukan tahap klasifikasi, dimana data yang telah direview digunakan untuk mengkategorikan dan mengklasifikasikan menurut urutan pembahasan dalam penelitian. Ketiga, penafsiran dan penafsiran data. Pada fase ini terjadi interpretasi atau pemberian makna yang

berarti pada data. Klasifikasikan data Anda dan hubungannya satu sama lain dan cari hubungan antara teori penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian Anda. Dan keempat, menarik kesimpulan dari data yang dianalisis. Sama halnya dengan pernyataan bahwa tahap penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber pustaka, mengutip referensi dan menampilkan hasilnya, maka hasil penelitian dideskripsikan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan ditarik kesimpulannya (Dharmaraksana, 2020).

### 3. HASIL DAN DISKUSI

Wilayah Banten, Jawa, dan Ulama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari masa Kerajaan dan Kesultanan hingga saat ini. Demikian pula peran kedua elemen ini sangat kompleks. Lalu seperti apa terminologi ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendukungnya seiring berkembangnya perspektif. Para Ulama biasanya memiliki dua kelompok santri yang dipromosikan sesuai dengan kemampuannya. Kelompok pertama terdiri dari orang-orang yang mempunyai kemampuan dan bakat untuk menjadi calon ulama dan guru di bidang ilmu agama, dan kelompok kedua terdiri dari orang-orang yang mempunyai kemampuan dan bakat bela diri. Kelompok kedua ini disebut jawara. Selain itu, ada anggapan bahwa jawara tersebut bisa dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, masyarakat Jawa yang menganut ilmu agamanya disebut "Jawara Ulama", dan kedua, mereka adalah golongan yang menggunakan "ilmu tersembunyi" (ilmu hitam). Penggunaan istilah "Ilmu Tersembunyi" bagi masyarakat Banten merujuk pada pengetahuan (keterampilan) untuk mencapai ilmu kebal (kadugalan) yang tidak berdasarkan ajaran Islam. Ilmu ini biasa juga disebut dengan "Ilmu Rawayan". Ada pula yang berpendapat bahwa jawara yang telah mempelajari agama disebut jawara ulama, dan ulama yang merangkap jawara disebut ulama jawara. Kepribadian seperti itu dihormati oleh masyarakat dan karena itu mempengaruhi pengambilan keputusan (Lubis, 2003).

Ada berbagai macam teori mengenai kelahiran dan kemunculan pertama Banten Jawa, namun dari segi sejarah belum diketahui secara pasti kapan Banten Jawa lahir. Meskipun sebagian sumber datanya berasal dari cerita rakyat Banten, namun peranan Jawa dalam berbagai aspek kehidupan Banten dapat ditelusuri hingga ke masa Kesultanan Banten. Peranan Jawa dalam kehidupan masyarakat Banten mulai terasa pada akhir runtuhnya Kesultanan Banten, dan pada abad XIX M, kekuasaan kolonial sudah tidak efektif lagi. Setelah dihapuskannya pemerintahan Kesultanan Banten oleh Daendles. Tekanan pemerintah Hindia Belanda yang semakin meningkat terhadap masyarakat adat menimbulkan konflik di masyarakat. Kekosongan pemerintahan menimbulkan kekacauan di banyak daerah di Banten. Konflik dan kekacauan tersebut memicu pemberontakan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat setempat, khususnya para Kyai atau Ulama. Dalam situasi seperti ini, muncul ulama yang bertindak sebagai pemimpin komunitas informal (Irfani, 2011).

Namun pada hakikatnya Jawa mempunyai sikap heroik sejak zaman kolonial, bekerja sama dengan Kiyai dan masyarakat Banten. Jawa Banten hadir sebagai pengawal Kiyai dan melindungi kebenaran. Banten mempunyai ciri khas tersendiri terkait Jawa yang tetap dipertahankan (Firdausi, 2016). Ketika tatanan sosial dan budaya masyarakat hancur, apalagi setelah pemerintah kolonial Belanda berhasil ambil alih Kesultanan Banten, kemunculan Jawa menjadi sosok yang patut dikagumi (Hudaeri, 2003). Hal ini menunjukkan bahwa para Jawa memosisikan dirinya sebagai subjek, bukan objek. Hal ini tidak berbeda dengan penjelasan partisipasi masyarakat sebagai agen aksi politik (Arasid et al., 2023).

Namun, seiring berkembangnya dogmatisme, banyak yang menyimpulkan, tanpa mempertimbangkan literatur atau sejarah aktual, bahwa Jawa bagaikan monster pemangsa dan pemberontak. Literatur dan sejarah menjelaskan bahwa ketika gerakan sosial yang melibatkan Kiyai dan Santri serta Jawa di Banten pada abad ke-19, pemerintah kolonial mengecam para Jawa tersebut dan menyamakan mereka dengan "bandit sosial". Pasca runtuhnya Kesultanan Banten pada masa Daendels, kekacauan pun terjadi dan seluruh tatanan masyarakat hampir runtuh. Dalam keadaan seperti ini, muncul pemimpin-pemimpin dari kalangan elit lokal, termasuk Kiyai. Mereka pada dasarnya telah membangkitkan semangat perlawanan terhadap penguasa asing. Sebagaimana telah disebutkan, terdapat resistensi dari berbagai faktor. Dalam situasi kacau, terjadi aktivitas ilegal seperti perampokan dan lain-lain. Bukan hal yang aneh bagi sebagian dari mereka adalah bangsawan kaya atau bangsawan lanjut usia yang telah kehilangan hak atas tanah mereka dan menggunakan cara-cara di luar hukum untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka. Dalam situasi seperti itu, mereka sering kali dipaksa bekerja sama dengan bandit dan perampok sungguhan. Karena gerakan perlawanan dilakukan secara terbuka, tak jarang mendapat simpati dari masyarakat. Namun perkembangan sekitar tahun 1880-an hanya menyebabkan perampok dan bandit melakukan penjarahan tanpa pandang bulu. Merekalah yang pada akhirnya mencoreng citra Jawa sejati. Hal ini dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial yang mencoreng citra pejuang sejati dengan mengklaim bahwa semua Jawa adalah bandit, sehingga menimbulkan perlawanan dalam bentuk gerakan sosial yang berupaya melawan kolonialisme asing. Misalnya, gerakan perlawanan petani di Cilegon

pada tahun 1888 muncul sebagai sebuah kerusuhan, ongeregelheden (pemberontakan), complot (komplotan), woelingen (kekacauan), onrust (ketidaknyamanan) (Lubis, 2003).

Reaksi terhadap keterlibatan ulama dalam politik bukanlah hal baru. Hal ini perlu diklarifikasi oleh orang-orang yang sebenarnya apolitis dalam kancah politik. Pemikiran politik Islam sebenarnya merupakan upaya (ijtihad) para ulama, spekulasi rasional untuk mencari landasan intelektual bagi fungsi dan peran negara dan pemerintah sebagai sarana mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara lahir dan bathin. Meski demikian, dapat ditambahkan bahwa munculnya ijtihad politik spekulatif juga didorong oleh keinginan untuk mendapatkan legitimasi demi menjaga tatanan politik yang ada (Thabrani, 2015).

Padahal, politik merupakan pilihan atau jalan yang tepat untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup bangsa dan negara. Konon sepeninggal Mangkubumi Arya Ranamangala, Banten sepenuhnya jatuh ke tangan Sultan Abdul Kadir. Padahal, Sultan Abdul Kadir terkenal dalam sejarah Banten sebagai ulama yang alim. Sultan menulis beberapa kitab ilmu agama dan membagikannya secara cuma-cuma kepada rakyatnya. Salah satu buku yang ditulisnya, "Insan Kamil", kemudian diterbitkan oleh Dr. Snook Fulgronje, perwira Hindia Belanda. Ditemani Ki Cili Duhung, Sultan kerap meninjau istana dan rakyat pada malam hari. Apabila ada masyarakat yang kedapatan menderita penyakit keesokan harinya Sultan memerintahkan Ki Gula Gesen dan Ki Gula Ngem (nama orang) untuk memberikan bantuan. Sultan juga sering seserangan atau mengontrol persawahan kerajaan, khususnya di wilayah Serang saat ini. Hasil panen sawah ini terkadang dijual, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan keraton, tapi juga untuk mengendalikan harga beras di pasar. Dengan cara ini kebutuhan beras masyarakat dapat terpenuhi (Microb & Chudari, 1993).

Aktivitas politik tidak lepas dari hakikat ideologi politik itu sendiri. Ideologi politik adalah seperangkat nilai, gagasan atau norma, keyakinan atau pandangan hidup yang dianut oleh seorang individu atau sekelompok orang yang menjadi landasan sikap dan posisi politiknya terhadap peristiwa dan persoalan politik yang dihadapinya. Nilai-nilai dan gagasan tersebut membentuk suatu sistem yang saling berhubungan. Landasan ideologi politik adalah keyakinan akan adanya pola tatanan sosial dan politik yang ideal. Ideologi politik memuat argumentasi dan diagnosis, serta saran-saran bagaimana mencapai tujuan ideal tersebut (Budiardjo, 2007). Juga dalam konsep dasar kebijakan politik, Plato menyatakan: Tujuan masyarakat politik adalah kebaikan bersama (Henry, 2015).

Penulis mencoba merefleksikan lebih jauh keterlibatan ulama dalam politik melalui berbagai sumber yang komprehensif. Sunan Gunung Jati, seorang penguasa Cirebon yang meruapakan salatu dari wali songo, mendirikan Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa, untuk memperluas kekuasaannya dan mengembangkan Islam. Sunan Gunung Jati kemudian meninggalkan putranya sebagai penguasa pertama Banten. Belakangan, ketika Cirebon melepaskan perwaliannya atas ujung barat Pulau Jawa (1552), Kesultanan Banten resmi berdiri, dan Pangeran Adipati Hasanuddin menjadi Sultan Hasanuddin. Keputusan tersebut merupakan keputusan politik yang sangat tepat (Lubis, 2003).

Dalam sejarah perkembangan Banten, peran ulama sangatlah penting sejak berdirinya Kesultanan Banten. Berdirinya Kesultanan Banten sendiri didahului dengan motif menolak kehadiran Portugis yang bertekad menyebarkan agamanya dan menghancurkan Islam dengan semangat Perang Salib. Syarif Hidayatullah, pendiri Kesultanan Banten, adalah seorang ulama yang kemudian digantikan oleh putranya Pangeran Hasanuddin yang juga menjadi seorang pendakwah sukses. Birokrasi kerajaan mencakup seorang qadi (hakim ketua), atau ulama, yang memainkan peran penting dalam semua keputusan. Qadi atau disebut juga fakih nazimuddin selalu dimintai pendapat dan persetujuannya dalam setiap perjanjian yang dibuat sultan (Microb & Chudari, 1993). Sejak masa Kesultanan, ulama menjadi pilar penting kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Di negara ini, sultan sebagai politisi juga menjalankan tugas panotgomo (penyelenggara kehidupan beragama), sebuah konsep yang menyatukan jiwa ulama dan umaro dalam satu struktur pemerintahan pemerintahan sultan (Muslim et al., 2015).

Pada konteks Pemilu, banyak yang menyebut tahun 2018 sebagai "tahun politik." Sebab, pemilu legislatif dan eksekutif dijadwalkan digelar pada waktu yang bersamaan. Namun sangat disayangkan di tahun politik tersebut, permasalahan akibat politisasi agama yang ditampilkan oleh oknum separatis yang tidak bertanggung jawab. Perkembangan politik identitas atau yang disebut juga dengan isu SARA terus berlanjut jika tidak segera diatasi, apalagi jika ditujukan pada perpecahan antar agama, suku, golongan, dan lain-lain sehingga akan menurunkan stabilitas pembangunan.

Selama ini banyak masyarakat Banten yang menilai kinerja Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden terus membaik, dan program Nawacita yang diusungnya telah meningkatkan baik bidang pendidikan, sosial, kesehatan, pertanian, perekonomian, dan Pendidikan serta pembangunan infrastruktur. Jawa Banten mendukung Jokowi karena melihat kinerja Jokowi selama menjabat presiden yang merata dalam mendorong pembangunan infrastruktur. Selain itu, terpilihnya calon Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin dari Banten membuat semakin antusias dalam ihwal dukungan.

Adabnya Masyarakat Banten patuh dan taat kepada ulama, Jokowi resmi menggandeng ulama asli Banten, yakni K.H. Maruf Amin cicit dari Syekh Nawawi al-Bantani (Masykur, 2018). Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan seorang ulama kelahiran Indonesia yang ilmunya sangat dihormati di dunia internasional, khususnya di Mekkah. Syekh Nawawi al-Bantani juga merupakan salah satu Imam Masjidil Haram, dan juga dikenal dengan julukan "Imam Nawawi Attzani," yang merujuk pada ahli hadits Imam Annawawi. Pun bahwa K.H. Ma'ruf Amin merupakan seorang politikus aktif yang memiliki karir panjang. Sejak tahun 2007 hingga saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Selain itu, K.H. Ma'ruf Amin juga pernah menjadi Ketua Fraksi Islam DPRD Jakarta, Anggota Partai Kebangkitan Bangsa MPR-RI, dan Ketua Komite VI DPR-RI. K.H. Ma'ruf Amin aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan dan politik serta di dunia perbankan nasional. Beliau merupakan Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) di berbagai bank syariah dan perusahaan asuransi, antara lain Bank Muammarat, Bank Syariah BNI, dan Bank Mega Syariah (Amin, 2017). Hal ini tidak berbeda dengan deskripsi karakter sebagai individu yang memiliki kredibilitas, kepercayaan (al-Amin), pesona, dan kekuasaan (Arasid et al., 2022).

Keterpilihan K.H. Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden, banyak kalangan Jawa, Ulama, santri, pemuda, dan masyarakat umum dengan antusias berkumpul dan membentuk organisasi-organisasi praktis serta swadaya untuk mendukung perjuangan politik bahkan hingga mendeklarasikannya. Berikut pernyataan sikap warga Kota Serang Provinsi Banten. Masyarakat Banten merasakan kemunculan K.H. Ma'ruf Amin asal Banten telah lama dikenal sebagai ulama yang melakukan dakwah. Ia juga dinilai mampu meredam gejolak politik, khususnya terkait isu Sara. Ia mampu meredam kegelisahan Sara, dan menurutnya sejauh ini efektif. Juga kepedulian terhadap masyarakat Banten (Rifai, 2018). Ulama dan Jawa menjadi simbol "Kokolot" yang dituakan oleh masyarakat baik pada urusan sosial kemasyarakatan maupun urusan keagamaan. Jawa dan ulama mempunyai kewenangan tertentu yang tidak dimiliki oleh pemimpin formal (umaro), seperti kepala desa dan camat. Namun terdapat hubungan yang kuat antara ketiga elit pemerintahan tersebut dengan sistem sosial (Karomani, 2009).

Peran sosial politik ulama dan Jawa di Banten erat kaitannya dengan kebijakan politik yang diterapkan pada masing-masing rezim. Hal ini menjadi sangat penting karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu mempunyai dampak yang signifikan terhadap langkah pergerakan para ulama dan Jawa (Muslim et al., 2015). Di sisi lain, status kiyai atau ulama dipandang sebagai kunci penting untuk memahami struktur masyarakat Indonesia, yang berpotensi menciptakan struktur kekuasaan daerah baru dan keterlibatannya dalam urusan publik (Hikmawan et al., 2021). Implikasi lainnya adalah pentingnya peran dan posisi strategis ulama sebagai mitra pemerintah (UMAR, 2020). Tugas ulama tidak hanya sekedar mengkaji, merumuskan dan mengembangkan pemikiran keagamaan, namun dalam konteks permasalahan sosial dan kebangsaan, mereka juga mempunyai tugas yang tidak kalah penting dan bahkan sangat strategis. Sejalan dengan pendapat tersebut, membangun masyarakat adalah tujuan pengembangan kepribadian (Rasyid, 2019).

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian diatas secara umum bahwa peran ulama dalam arena politik bukanlah kubu yang saling bersebrangan, namun justru peran ulama sangatlah strategis sebagai aktor penyeimbang agama dalam upaya memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pun pada aspek teritorial Provinsi Banten bahwa ulama dan Jawa Banten berpartisipasi di garda terdepan dalam arena politik terlebih ketika kesultanan Banten runtuh oleh kolonial Belanda. Munculnya Jawa, sejarah menjelaskan bahwa Ulama di Daerah Provinsi Banten umumnya memiliki santri dengan dua klasifikasi potensi yakni *pertama*, santri yang berpotensi unggul dalam bidang agama sehingga harapannya kelak menjadi ulama atau Kiyai, sedangkan *kedua*, yakni santri yang memiliki potensi unggul dalam bidang bela diri disebut Jawa.

Pun bahwa Jawa dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni, *pertama* Jawa Ulama yang memegang teguh ilmu agama dan hadir atas dasar kronologis sebagai murid Ulama. Sedangkan, *kedua* Jawa yang menganut ilmu hitam. Disisi lain bahwa telah terjadi pergeseran kerangka berfikir terhadap Jawa yang dahulu pengorbanan dan perilaku politiknya untuk kepentingan publik namun justru saat ini perilaku politik nya hanya untuk kepentingan kelompok tertentu saja.

Sedangkan pada aspek dukungan Masyarakat Banten khususnya Jawa terhadap Ma'ruf Amin Sebagai Calon Wakil Presiden memiliki indikasi bahwa *pertama*, Ma'ruf Amin sebagai Masyarakat Banten, *kedua*, Ma'ruf Amin merupakan tokoh Ulama kharismatik yang berkualitas baik pada pengalamannya sebagai Pejabat Negara maupun sebagai Ulama dan *ketiga*, bahwa Ma'ruf Amin merupakan keturunan Ulama

Kharismatik yang dikenal dunia yakni Syaikh Nawawi Al-bantani. Atas dasar demikian Masyarakat Banten memberikan dukungan Terhadap Ma'ruf Amin Sebagai Calon Wakil Presiden dengan penuh antusias.

## DAFTAR PUSTAKA

- AFRIATNA, R. (2016). *DINAMIKA PATRONASE POLITIK JAWARA DI BANTEN* [UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21984/>
- Amin, M. (2017). *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI)*. Kementerian Agama : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Arasid, M. I., Djuyandi, Y., & Sumadinata, R. W. S. (2022). Strategi Komunikasi Politik Untuk Memperoleh Dukungan Pemuda Dalam Pilkada Kota Serang: Studi Pada Pasangan Calon Syafrudin-Subadri Pendahuluan Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan serangkaian kegiatan dalam memilih kepala dan wakil kepala daerah yang d. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 8(1), 62–77. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i1.12779>
- Arasid, M. I., Wahyiah, I. R., & Laksana, A. (2023). Peran Media Sebagai Sarana Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik. *Turast: Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 11(2), 173–184. <https://doi.org/10.15548/turast.v11i2.6824>
- Athoullah. (2020). JAWARA DALAM PERUBAHAN SOSIAL DI MASYARAKAT BANTEN. *Desanta: Indonesia Of Interdisciplinary Journal*, 1(1), 26–35.
- Banten, P. R. P. (2024). *Geografi*. Portal Resmi Provinsi Banten. <https://bantendev.id/geografi#>
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Revisi). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4 Terjemah). Pustaka Pelajar.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Firdausi, I. A. (2016). JAWARA DALAM BUDAYA BANTEN (Studi Etnografi Komunikasi Mengenai Jawara di Banten). *Jurnal Lontar*, 4(3), 15–29.
- Fitriyah, N., Sarwoprasodjo, S., Sjaf, S., & Soetarto, E. (2019). Interaksi Politik Jawara dalam Pembangunan Perspektif Tindakan Komunikatif. *Warta ISKI*, 2(2), 104–116.
- Hamid, A. (2010). MEMETAKAN AKTOR POLITIK LOKAL BANTEN PASCA ORDE BARU: Studi Kasus Kiyai dan Jawara di Banten. *Politika, Vol. I, ((2))*, 1–113.
- Henry, S. J. (2015). *Filsafat Politik* (Terjemahan). Pustaka Pelajar.
- Hikmawan, M. D., Godjali, M. R., & Indriyany, I. A. (2021). Kiyai dan Strukturasi Kekuasaan di Pandeglang, Banten. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 88–106. <https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.88-106>
- Hudaeri, M. (2003). Jawara di Banten: Peran, Kedudukan dan Jaringan. *Alqalam*, 20(97), 43–78. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/645>
- Ilham, T. (2019). Ulama dan Jawara dalam Dinamika Politik Banten. *Politikologi*, 7(1), 67–78.
- Irfani, F. (2011). JAWARA BANTEN Sebuah Kajian Sosial, Politik dan Budaya. In *Universitas Nusantara PGRI Kediri* (Vol. 01). YPM Press.
- Karomani. (2009). ULAMA, JAWARA, DAN UMARO: Studi Tentang Elite Lokal di Banten. *Sosiohumaniora*, 4(2), 1–15. <http://www.albayan.ac>
- Kevinia, C., Putri syahara, P. sayahara, Aulia, S., & Astari, T. (2024). Analisis Teori Semiotika Roland Barthes Dalam Film Miracle in Cell No.7 Versi Indonesia. *COMMUSTY Journal of Communication Studies and Society*, 1(2), 38–43. <https://doi.org/10.38043/commusty.v1i2.4082>
- Lubis, N. H. (2003). *Banten Dalam Pergumulan: Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Masykur. (2018, August 10). *Deklarasi Dukung Jokowi, Jawara Banten: Ma'ruf Amin Menguatkan Dukungan - Kabar Banten*. Kabar Banten. <https://kabaranten.pikiran-rakyat.com/serang/pr-59612516/deklarasi-dukung-jokowi-jawara-banten-maruf-amin-menguatkan-dukungan>
- Michrob, H., & Chudari, A. M. (1993). *Catatan Masa Lalu Banten*. SAUDARA Serang.
- Muslim, A., Kolopaking, L. M., Dharmawan, A. H., & Soetarto, E. (2015). Dinamika Peran Sosial Politik Ulama dan Jawara di Pandeglang Banten. *MIMBAAR*, 31(2), 461–474.
- Nasution, N. H. (2017). Ulama dan Politik: Keterlibatan Ulama Sumatera Selatan dalam Politik Praktis dan Community Empowerment Pada Abad XX. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 1(2), 126–144.
- Putra, O. E. (2016). Ulama sebagai penyeimbang kekuatan sosial politik di indonesia. *Jurnal Tarjih*, 13(1), 67–80.
- Raco, R. J. (2010). *METODE PENELITIAN KUALITATIF JENIS, KARAKTERISTIK, DAN KEUNGGULANNYA*. PT. Grasindo.

- Rasyid, M. N. (2019). KAPASITASULAMA DALAM BERNEGARA. *Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(1), 590–597.
- Ridho, H., Wasik, A., & Washil, S. (2021). KIIYAI DAN POLITIK; RELASI ULAMA DAN UMARA DALAM MEWUJUDKAN PERDAMAIAN UMAT BERAGAMA DAN BERNEGARA. *AL-IJTIMA'I-International Journal of Government and Social Science*, 11(1), 54–66.
- Rifa'i, B. (2018, August 10). *Jawara dan Ulama Banten Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-4160631/jawara-dan-ulama-banten-deklarasi-dukung-jokowi-maruf-amin>
- Rubaidi. (2021). Relasi Kuasa Ulama Sufi dan Negara dalam Kultur-Budaya Politik Indonesia. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 16(2), 70. <https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.3143>
- Thabrani, A. M. (2015). IJTIHAD POLITIK UMAR IBN AL-KHATTAB (Implementasi Fiqh Kontekstual dalam Pemerintahan Islam). *Nuansa*, 12(2), 260–276.
- Topan, A. (2022). Respons Aliansi Ulama Madura (AUMA) terhadap Dinamika Politik Keagamaan di Pamekasan Madura. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(1), 92–106. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v4i1.5576>
- UMAR, S. U. (2020). *Ulama dan politik* [UIN Alauddin Makassar]. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/[https://www.researchgate.net/profile/M-Dian-Hikmawan/publication/351149578\\_Kiyai\\_dan\\_Strukturasi\\_Kekuasaan\\_di\\_Pandeglang\\_Banten/links/60a45e6d4585158ca05c17ee/Kiyai-dan-Strukturasi-Kekuasaan-di-Pandeglang-Banten.pdf?\\_sg%5B0%5D=started\\_experiment\\_milestone&origin=journalDetail&\\_rtd=e30%3D](https://www.researchgate.net/profile/M-Dian-Hikmawan/publication/351149578_Kiyai_dan_Strukturasi_Kekuasaan_di_Pandeglang_Banten/links/60a45e6d4585158ca05c17ee/Kiyai-dan-Strukturasi-Kekuasaan-di-Pandeglang-Banten.pdf?_sg%5B0%5D=started_experiment_milestone&origin=journalDetail&_rtd=e30%3D)